

BPJS Bantah Terlibat Kasus Subang

HASANULRIZOA. BOWO PRIBADI

JAKARTA - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan, pihaknya tidak berkaitan sama sekali dengan kasus korupsi dana BPJS di Subang, Jawa Barat

"Kasus Subang itu bukan korupsi oleh aparat BPJS," kata Fachmi Idris, di Jakarta, Rabu (13. 4).

Mulanya, dana BPJS Kabupaten Subang untuk tahun 2014 dicairkan dari BPJS pusat sebesar Rp 41 miliar. Kemudian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan dana tersebut disalahgunakan sehingga merugikan negara sebesar Rp 4,7 miliar. Kasus ini sudah diselidiki Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar sejak medio 2015.

Terkait itu, Fachmi Idris membenarkan aliran dana BPJS pusat ke BPJS daerah, termasuk Kabupaten Subang. Namun, penggunaan dana tersebut seutuhnya merupakan tanggungjawab Dinas Kesehatan setempat, bukan lagi BPJS pusat

"Kita punya perjanjian kerja sama dalam program-program dengan pemda. Kita membayar biaya kapitasi puskesmas ke Dinas Kesehatan. Persoalan dia kemudian menyalahgunakan, itu persoalan korupsi di sana. Jadi clear tak melibatkan aparat dan lembaga BPJS," ujar Fachmi.

Ada dua orang pejabat Dinas. Kesehatan Kabupaten Subang yang berstatus terdakwa, yakni Budi Subiantoro dan Jajang Abdul Kholik. Mereka sudah memasuki proses hukum di Pengadilan Tipikor Bandung.

Bupati Ojang diduga menyuapjaksa penuntut sebesar Rp 528 juta agar tidak terseret kasus korupsi dana BPJS yang kini sedang dalam proses persidangan. Tim penyidik KPK juga menetapkan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupatn Subang Jajang Abdul Kholik dan istrinya, Lenih Marlioni, sebagai tersangka. KPK juga telah menahan Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Deviyanti Rochaeni.

KPK provinsi

Sementara itu, KPK masih terus mengkaji wacana pembentukan KPK di daerah (di tingkat provinsi). Di mana, hal itu tujuannya untuk memperkuat fungsi kontrol di daerah. KPK telah memiliki strategi melalui pembentukan satgas KPK.

Hal ini ditegaskan Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menanggapi keinginan Gubernur Jawa Tengah terkait kemungkinan dibentuknya lembaga antirasywah ini di daerah.

Menurut Yuyuk, pimpinan KPK sangat merespons keinginan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar KPK dibentuk di daerah, tak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di Tanah Air.

Bahkan, keinginan tersebut telah disampaikan secara langsung oleh Ganjar saat membawa sekitar 17 kepala daerah di wilayahnya untuk belajar bersama KPK dalam menjalankan pemerintahan yang berintegritas dan berdiskusi soal gratifikasi, Maret 2016 lalu.

Terkait hal ini, masih dalam tahap kajian internal kami. Meski memiliki keinginan yang sama KPK tentu butuh berbagai kajian lebih mendalam," katanya.

ed muhammad hadi

Kategori : 5.3 BUK , Eselon I Yankes , Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) , Yankes